

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

Melalui landasan teori, peneliti dapat memperjelas suatu hubungan antarvariabel dan memberikan penjelasan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian “Analisis Implementasi Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Wiyung Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang memfokuskan suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan, karena dapat mempengaruhi pemahaman yang lebih mendalam, sehingga berbagai variabel dan dapat berkolaborasi dengan selaras untuk mencapai tujuan tersebut (Ramadhani,2025).

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Pemahaman mendalam terhadap konsep ini sebagai landasan analitis untuk mengidentifikasi faktor dan mekanisme yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan di lapangan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan berfungsi sebagai penunjang jembatan antara tujuan yang telah dirumuskan dan hasil nyata dalam praktik pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (Akib, H., & Taringan, 2008) yang mendefinisikan implementasi sebagai proses membangun jaringan kerja. Jaringan ini memfasilitasi pencapaian sasaran kebijakan publik melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan kolaborasi aktif dari beragam aktor.

Secara etimologis, implementasi berarti proses pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini berasal dari kata “toimplement” yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Menurut Putra (2023), implementasi bukan sekadar menjalankan peraturan, tetapi juga untuk proses dinamis yang melibatkan adaptasi kebijakan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, fleksibilitas pelaksana menjadi kunci keberhasilan implementasi. Fokus utama dalam kebijakan implementasi terletak pada dinamika yang muncul setelah ditetapkan kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya upaya untuk menjalankan pelaksanaannya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan sekedar proses pelaksanaan atau penerapan semata. Tetapi Lebih dari itu, implementasi mencakup keseluruhan tahapan berbagai macam sektor dan segala peristiwa yang berlangsung setelah suatu kebijakan atau program resmi diberlakukan. Proses ini juga mencakup aktivitas administratif serta berbagai upaya yang diarahkan untuk menciptakan perubahan atau dampak yang nyata di tengah masyarakat.

Dalam proses implementasinya, pembuat kebijakan seringkali menghadapi ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan pelaksanaan di lapangan. Perbedaan antara harapan dan hasil nyata sering kali tidak terhindarkan. Faktor beragam dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut, salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan, sementara kebijakan tersebut tetap harus dilaksanakan tanpa adanya opsi yang tertunda (Tachjan., 2006; Indah, V. F., dkk2024).

Keberhasilan suatu keputusan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas implementasinya. Hal ini menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil, karena kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan berdampak jika tidak adanya pelaksanaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Madaul, M. dkk 2025) tentang implementasi IKD, yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lebih ditentukan oleh faktor-faktor praktis di lapangan, seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, daripada perumusan kebijakan itu sendiri. Tahap implementasi memegang peranan sangat krusial karena berfungsi mengonversi kebijakan ke dalam bentuk tindakan operasional yang konkret.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain berupa hasil yang konkret dan dapat diamati, pencapaian (*outcome*) yang tercermin dari tercapainya target (seperti meningkatnya pemahaman masyarakat), manfaat (*benefit*) yang dapat dirasakan, serta dampak (*impact*) baik yang bersifat positif maupun negatif. Selain itu, efektivitas kebijakan juga dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menjangkau individu atau kelompok tertentu sebagai penerimanya (Sos, 2020).

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Menurut penelitian terdahulu Mariyam Musawa (Implementasi Program Beras Miskin Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, Tahun 2009, UNDIP), Teori – Teori Implementasi Kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2005) adalah:

1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005) Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*).
- c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan;

sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni:

- a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
- c) dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2. Penjelasan rinci konsep implementasi Van Meter dan Van Horn terdapat 6 variabel yaitu :

A. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

Merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan harus jelas, konsisten, dan dapat diukur agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Jika standar/tujuhannya tidak jelas, pelaksana akan bingung dan hasil kebijakan bisa melenceng.

B. Sumber Daya (Resources)

Meliputi dana, tenaga kerja, waktu, peralatan, dan informasi yang tersedia untuk implementasi.

Kekurangan sumber daya dapat menyebabkan implementasi kebijakan gagal, walaupun kebijakannya bagus.

C. Karakteristik Agen Pelaksana (Characteristics of the Implementing Agencies)

Struktur organisasi, kompetensi, dan komitmen dari pihak pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Termasuk dalamnya birokrasi, sistem kerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi.

D. Komunikasi Antar Organisasi (Inter-organizational Communication and Enforcement Activities)

Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana harus efektif dan konsisten.

Informasi kebijakan harus sampai ke pelaksana secara lengkap, jelas, dan tepat waktu.

Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan kebijakan.

E. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions)

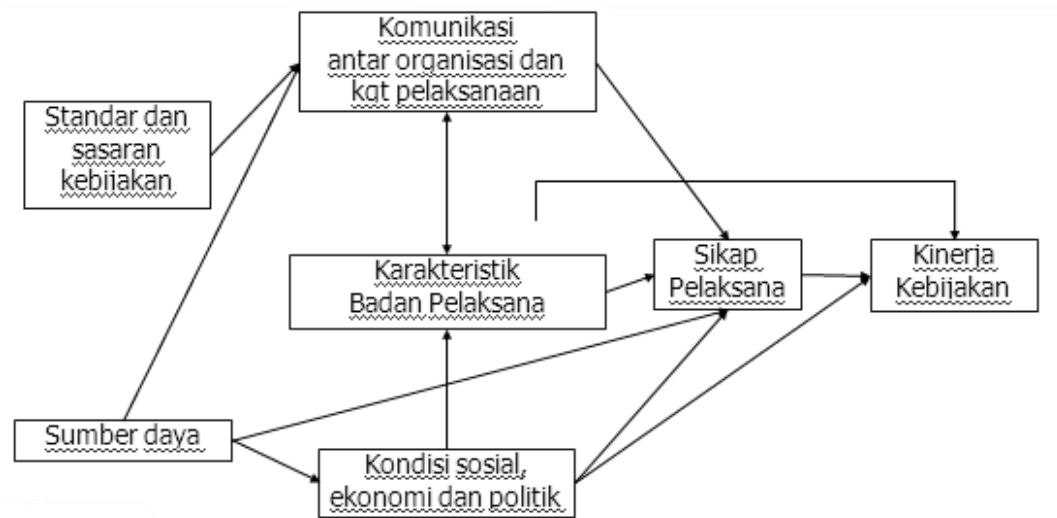
Faktor eksternal yang dapat memengaruhi proses implementasi.

Misalnya: situasi politik lokal, kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, atau budaya lokal.

F. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition of Implementers)

Mencakup pengetahuan, pemahaman, dan sikap para pelaksana terhadap kebijakan.

Jika pelaksana tidak setuju atau tidak memahami kebijakan, maka implementasinya kemungkinan besar akan gagal.



Gambar 2.1 konsep implementasi Van Meter dan Van Horn

2.2.1 Tahap-Tahap Implementasi

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik Menurut Joko Pramono (2020) sebagai berikut :

1. Persiapan (Preparation Stage)

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan awal untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Termasuk di dalamnya sosialisasi kebijakan, pembentukan struktur pelaksana, serta penyediaan sumber daya manusia dan anggaran.

2) Pelaksanaan (Implementation Stage)

Tahap ini merupakan proses nyata dari penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Aparatur pelaksana menjalankan program sesuai dengan pedoman, peraturan, dan tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan publik.

3) Koordinasi dan Pengawasan (Coordination and Supervision Stage)

Diperlukan koordinasi antara lembaga pelaksana dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan agar kebijakan berjalan sesuai rencana. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan, hambatan, atau kendala teknis maupun administratif.

4) Evaluasi Pelaksanaan (Evaluation Stage)

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap hasil implementasi kebijakan. Evaluasi mencakup penilaian efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah dijalankan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2.3 Konsep Data Kependudukan

Kependudukan adalah disiplin ilmu yang secara holistik menganalisis dinamika populasi manusia. Studi ini tidak hanya mencakup jumlah individu, tetapi juga bagaimana populasi berubah dalam hal struktur (komposisi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan), distribusi geografis, dan pertumbuhan (Suwanto, 2021). Pemahaman yang mendalam tentang konsep kependudukan ini menjadi fondasi esensial untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang efektif di berbagai sektor (Suryadi & Handayani, 2022).

Dinamika kependudukan dipengaruhi oleh tiga komponen demografi utama yang saling berinteraksi:

- 1) Fertilitas (Kelahiran): Mengacu pada tingkat kelahiran hidup dalam suatu populasi. Indikator seperti Angka Kelahiran Kasar (AKK) dan Angka Kelahiran Total (TFR) digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah anak

yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduktifnya. Tingkat fertilitas yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, sementara penurunannya dapat mengarah pada penuaan populasi (Suwanto, 2021).

- 2) **Mortalitas (Kematian):** Menjelaskan tingkat kematian dalam suatu populasi. Indikator seperti Angka Kematian Kasar (AKM), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Harapan Hidup Saat Lahir sering dipakai untuk mencerminkan kondisi kesehatan, kualitas layanan kesehatan, dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Penurunan mortalitas, khususnya mortalitas bayi dan anak, berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan perubahan struktur usia penduduk (Bappenas, 2020).
- 3) **Migrasi (Perpindahan Penduduk):** Meliputi perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik secara internal maupun internasional. Migrasi dapat memengaruhi distribusi spasial penduduk secara signifikan, menciptakan konsentrasi penduduk di perkotaan atau kekosongan di pedesaan, serta mengubah komposisi demografi di wilayah tujuan dan asal (Suryadi & Handayani, 2022).

Interaksi kompleks antara kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi) tidak hanya membentuk kemajuan pertumbuhan penduduk, tetapi juga memicu perubahan mendasar dalam struktur demografi suatu wilayah. Misalnya, kombinasi penurunan fertilitas dan mortalitas (terutama mortalitas bayi) dapat mempercepat proses transisi demografi, yang seringkali mengarah pada bonus demografi jika proporsi penduduk usia produktif sangat besar, atau sebaliknya, penuaan populasi jika proporsi penduduk usia lanjut

meningkat drastis (Sutikno, 2020). Selain itu, transisi demografi memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Arini, GA, Daeng, A., & Putri, 2022).

2.3.1 Pengertian data kependudukan

Data kependudukan dapat didefinisikan sebagai seperangkat informasi terstruktur dan terukur mengenai karakteristik serta kondisi populasi manusia pada suatu wilayah tertentu (Mantra, 2018). Informasi ini jauh melampaui sekadar jumlah total individu; ia merangkum berbagai atribut vital yang mendeskripsikan populasi secara mendalam. Atribut tersebut meliputi komposisi usia dan jenis kelamin, tingkat pendidikan (misalnya tingkat tamatan tertinggi atau angka melek huruf), status perkawinan, jenis pekerjaan dan sektor ekonomi tempat individu bekerja, tingkat pendapatan, hingga distribusi spasial atau geografis penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam kerangka legal di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara eksplisit mengategorikan data kependudukan sebagai data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Data perseorangan merujuk pada informasi spesifik setiap individu (nama, NIK, alamat, tanggal lahir), sementara data agregat adalah kumpulan data perseorangan yang telah diolah menjadi informasi statistik kelompok (misalnya jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk usia produktif) (Prasetyo & Wulandari, 2020). Ketersediaan informasi yang komprehensif, valid, dan senantiasa mutakhir adalah prasyarat fundamental bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pembangunan

(Suryadi & Handayani, 2022). Dengan demikian, identitas kependudukan berfungsi sebagai administratif semata, tetapi juga diperuntukkan kebutuhan keseluruhan masyarakat secara akurat, dan tepat berbasis instrumental bagi formulasi kebijakan publik yang responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Siregar, 2021). Ini menunjukkan bahwa data kependudukan adalah aset strategis dalam proses tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien.

2.3.2 Jenis-jenis Data Kependudukan

Data kependudukan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai parameter, yang esensial untuk analisis demografi dan perencanaan. Jenis-jenis data ini umumnya meliputi:

- 1) Data Demografi Dasar: Penjelasan dan Analisis Statistik Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya dalam publikasi Kecamatan Wiyung Dalam Angka selama lima tahun terakhir (2019–2023), dapat dijelaskan tiga statistik utama yang menggambarkan kondisi demografis di Kecamatan Wiyung, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) komposisi gender, dan (3) rasio jenis kelamin.

A. Jumlah Penduduk (Statistik 1):

Total penduduk Kecamatan Wiyung menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dari 72.720 jiwa pada tahun 2019 menjadi 75.382 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk sebesar kurang lebih 3,6%* selama lima tahun terakhir. Menurut BPS (2024), peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan alami serta arus migrasi ke wilayah Surabaya bagian barat yang berkembang sebagai kawasan permukiman baru.

B. Komposisi Gender (Statistik 2):

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan keseimbangan yang relatif stabil. Jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan proporsi rata-rata 49,9% laki-laki* dan 50,1% perempuan*. Pola ini mencerminkan kondisi umum wilayah perkotaan, di mana tingkat urbanisasi dan pekerjaan sektor jasa sering menarik lebih banyak penduduk perempuan usia produktif.

C. Rasio Jenis Kelamin (Statistik 3):

Rasio jenis kelamin di Kecamatan Wiyung selama periode 2019–2023 berkisar antara 98 hingga 100, yang berarti terdapat sekitar 98–100 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Nilai ini menunjukkan keseimbangan gender yang baik dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut.

Secara umum, struktur demografis Kecamatan Wiyung menunjukkan pertumbuhan penduduk yang positif dengan keseimbangan gender yang stabil mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang.” (BPS Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung Dalam Angka 2024).

- 2) Data Geografis Kependudukan: Merujuk pada sebaran spasial penduduk, termasuk kepadatan penduduk per wilayah administratif atau geografis (misalnya per kilometer persegi), serta pola konsentrasi dan penyebaran di area perkotaan atau pedesaan. Informasi ini krusial untuk perencanaan tata ruang, penentuan lokasi fasilitas publik, dan menguraikan perkembangan kependudukan Disdukcapil Surabaya (Perkembangan Administrasi Kependudukan Kota Surabaya 2023)
- 3) Data Sosial Kependudukan: Meliputi karakteristik sosial individu dalam populasi, seperti status pendidikan (tingkat pendidikan terakhir yang

ditamatkan, angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang), status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati), komposisi rumah tangga (jumlah anggota keluarga, kepala rumah tangga), dan status disabilitas. Data ini memberikan wawasan tentang kualitas hidup, kesetaraan sosial, dan potensi sumber daya manusia (Biro Pusat Statistik, 2020).

- 4) Data Ekonomi Kependudukan: Berfokus pada aspek ekonomi penduduk, termasuk status pekerjaan (bekerja, menganggur, pelajar, ibu rumah tangga), sektor pekerjaan (pertanian, industri, jasa), pendapatan (rata-rata pendapatan per kapita atau per rumah tangga), dan tingkat kemiskinan. Data ini vital untuk analisis pasar tenaga kerja, penyusunan program pengentasan kemiskinan, kebijakan ekonomi makro, dan pengembangan UMKM (Putra Anugerah Cristian 2022).
- 5) Data Administrasi Kependudukan: Merupakan data yang dihasilkan dari proses registrasi penduduk secara berkelanjutan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti akta kelahiran, akta kematian, catatan perkawinan/perceraian, dan surat pindah. Data ini bersifat dinamis dan mencerminkan peristiwa vital yang memengaruhi perubahan populasi secara *real-time*, menjadikannya sumber yang sangat relevan untuk pembaruan data (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022).

2.3.3 Manfaat Data Kependudukan

Data kependudukan yang akurat dan terbaru memiliki manfaat yang sangat luas dan fundamental bagi berbagai sektor pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Manfaat utama tersebut meliputi:

- 1) **Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan:** Data demografi memungkinkan pemerintah untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan akan pangan, sandang, perumahan, energi, dan fasilitas dasar lainnya. Ini adalah dasar untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (misalnya RPJMN, RPJMD) yang responsif terhadap dinamika populasi dan memastikan keberlanjutan sumber daya (Rachmat Pambudy, 2025).
- 2) **Alokasi Sumber Daya yang Efisien:** Dengan mengetahui sebaran dan karakteristik penduduk secara detail, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Misalnya, penentuan lokasi pembangunan sekolah atau puskesmas, penyaluran bantuan sosial, atau pengembangan jaringan transportasi dapat disesuaikan dengan konsentrasi dan kebutuhan spesifik masyarakat di suatu wilayah (Milenia, 2022).
- 3) **Formulasi Kebijakan Publik yang Tepat Sasaran:** Data kependudukan membantu dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif, seperti kebijakan keluarga berencana, program kesehatan masyarakat, pengembangan angkatan kerja, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan mitigasi bencana. Kebijakan yang didasarkan pada data faktual

cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Mansur J,2021).

- 4) Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pembangunan: Data kependudukan berfungsi sebagai indikator kunci untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari program-program pemerintah. Perubahan pada angka harapan hidup, angka kematian bayi, tingkat pendidikan, atau tingkat pengangguran dapat menjadi tolok ukur objektif efektivitas kebijakan dan dasar untuk penyesuaian strategi (Biro Pusat Statistik, 2020).
- 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Data kependudukan yang akurat memfasilitasi peningkatan efisiensi dan kualitas layanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP, akta lahir, akta kematian, dan dokumen penting lainnya. Ini pada gilirannya meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap hak-hak sipil mereka dan memangkas waktu serta biaya birokrasi (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022).

2.4 Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, administrasi kependudukan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan menuju sistem digital. Era globalisasi dan kebutuhan akan efisiensi menuntut inovasi dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Salah satu inovasi terkini dan paling relevan dalam konteks ini adalah pengenalan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merepresentasikan evolusi dari kartu identitas fisik menuju bentuk digital yang terintegrasi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses data kependudukan serta pelayanan publik secara luas. Penerapan

IKD merupakan bagian dari visi *e-government* untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022).

2.4.1 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat didefinisikan sebagai representasi elektronik dari dokumen kependudukan yang diakses melalui aplikasi pada *smartphone*. Sistem ini menyajikan informasi pribadi individu dalam format digital, baik melalui tampilan foto maupun kode QR (Zafira dan Hertati, 2023). Inisiatif peluncuran IKD ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mendigitalisasi dokumen kependudukan yang selama ini digunakan oleh warga negara Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan agar prosesnya menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien (Zafira, S. A., & Hertati, 2023). Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara resmi diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022. Regulasi ini secara spesifik merinci standar dan spesifikasi untuk perangkat keras dan lunak, blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta pedoman penyelenggaraan IKD. Implementasi IKD ini dilakukan secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kota/kabupaten. Selanjutnya, cakupan diperluas kepada pegawai instansi pemerintahan lainnya di seluruh Indonesia, diikuti oleh kelompok mahasiswa dan pelajar, sebelum akhirnya diterapkan secara merata kepada masyarakat umum.

Individu yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) fisik, atau mereka yang sudah merekam data biometrik tetapi belum menerima KTP-el dalam bentuk kartu, kini dapat memperoleh Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai representasi digital dari dokumen kependudukan mereka. Tujuan penyelenggaraan IKD ini secara spesifik diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022. Peraturan tersebut, yang juga mengatur standar perangkat keras dan lunak serta blangko KTP Elektronik, menetapkan bahwa IKD dirancang untuk:

Berdasarkan regulasi tersebut, tujuan utama penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) meliputi beberapa aspek menyediakan berbagai fitur utama yang mendukung transformasi digital pelayanan publik :

- 1) Validasi Data Mandiri: Penduduk dapat dengan mudah mengakses dan memverifikasi data pribadi mereka secara *real-time* langsung dari perangkat digital mereka, mengurangi kebutuhan untuk membawa dokumen fisik atau mengunjungi kantor layanan. Ini juga meningkatkan transparansi data bagi pemiliknya.
- 2) Integrasi Layanan Publik: Aplikasi IKD memungkinkan integrasi yang mulus dengan berbagai layanan publik lainnya, seperti layanan perbankan (pembukaan rekening, verifikasi transaksi), kesehatan (akses rekam medis), atau layanan pemerintah lainnya (pengajuan perizinan, bantuan sosial). Hal ini memfasilitasi transaksi dan verifikasi identitas secara digital yang lebih cepat dan aman.

- 3) Keamanan Data: Menggunakan teknologi enkripsi dan sistem keamanan data yang canggih untuk melindungi informasi pribadi penduduk dari akses tidak sah, penyalahgunaan, atau kebocoran data. Autentikasi berlapis seperti PIN dan biometrik (sidik jari atau pemindaian wajah) diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat mengakses data mereka.
- 4) Efisiensi Administrasi: Dengan adanya IKD, proses birokrasi dan prosedur yang rumit dalam proses administrasi kependudukan dapat dipangkas secara signifikan. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu tunggu dan biaya operasional bagi pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- 5) Aksesibilitas Tinggi: Mempermudah akses penduduk terhadap dokumen kependudukan mereka kapan saja dan di mana saja, selama mereka memiliki perangkat *smartphone* dan koneksi internet yang stabil. Ini sangat berguna dalam situasi darurat atau saat dokumen fisik tidak tersedia.

Pengembangan IKD ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan *smart governance* dan pelayanan publik yang adaptif terhadap era digital, mendorong terbentuknya ekosistem digital.

2.4.2 Mekanisme Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Mekanisme pelayanan IKD didesain untuk menyederhanakan proses verifikasi dan penggunaan identitas digital, sekaligus memastikan keamanan data. Umumnya, proses aktivasi dan penggunaan IKD melibatkan langkah-langkah berikut:

- 1) Registrasi dan Aktivasi Awal: Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dapat memulai proses dengan mengunduh aplikasi IKD dari toko aplikasi resmi (Google Play Store atau Apple App Store). Proses aktivasi lanjutan memerlukan verifikasi data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Verifikasi ini biasanya melibatkan pemindaian wajah (*face recognition*) untuk pencocokan biometrik dengan data KTP-el, serta validasi data identitas oleh petugas Dukcapil. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan keabsahan identitas pengguna.
- 2) Akses dan Penggunaan Sehari-hari: Setelah teraktivasi dan akun digital terbentuk, data kependudukan dapat diakses melalui aplikasi IKD. Pengguna dapat menunjukkan QR code yang dihasilkan aplikasi atau data digital mereka untuk verifikasi identitas dalam berbagai keperluan, seperti saat melakukan transaksi di lembaga keuangan, mendaftar layanan publik, mengisi formulir online, atau sebagai pengganti KTP-el fisik jika diperlukan (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022).
- 3) Keamanan dan Autentikasi Lanjutan: Setiap kali aplikasi IKD diakses atau digunakan untuk verifikasi, seringkali diperlukan lapisan autentikasi tambahan, seperti memasukkan PIN pribadi yang telah dibuat, atau melalui *biometric verification* (sidik jari/pemindaian wajah). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat mengakses dan menggunakan data IKD mereka, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan identitas.

- 4) Pembaruan Data Otomatis dan Terintegrasi: Salah satu keunggulan IKD adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan database kependudukan nasional. Ini berarti bahwa pembaruan data pribadi (misalnya perubahan status perkawinan, alamat tempat tinggal, atau penambahan anggota keluarga di Kartu Keluarga) dapat terjadi secara lebih otomatis dan *real-time* di dalam aplikasi IKD, tanpa perlu mencetak ulang kartu fisik secara berkala. Hal ini meningkatkan efisiensi dan akurasi data (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022).

Implementasi IKD bertujuan untuk menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih efisien, aman, responsif, dan terintegrasi di era digital, mendukung visi Indonesia sebagai negara yang melek teknologi dalam administrasi publik.

2.5. Penelitian Terdahulu

Berbagai riset sebelumnya telah mengulas secara ekstensif tentang konsep kependudukan, pemanfaatan data demografi, serta evolusi administrasi kependudukan yang didukung teknologi digital dari beragam sudut pandang. Kumpulan studi ini menyediakan fondasi teoritis dan empiris yang krusial bagi penelitian yang sedang dilakukan ini, sekaligus menyoroti area yang belum banyak dieksplorasi yang akan diisi oleh penelitian ini.

Salah satu studi relevan, yang dilakukan oleh Wahyuni (2022), menganalisis dampak pergeseran struktur usia penduduk terhadap rasio ketergantungan di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan angka kelahiran berhasil mengurangi beban ketergantungan anak, namun, potensi peningkatan

beban ketergantungan pada kelompok usia lanjut perlu diantisipasi melalui strategi kebijakan jaminan sosial yang proaktif. Studi ini menjadi penting karena menggarisbawahi urgensi data struktur usia dalam konteks perencanaan regional di Jawa Timur, yang secara langsung berkaitan dengan konteks perkotaan seperti Surabaya.

Selain itu, sebuah survei oleh Pusat Studi Demografi Universitas Airlangga (2021) terhadap migrasi internal di kawasan Gerbang kertosusilo (yang mencakup Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) mengungkapkan adanya pola mobilitas penduduk yang signifikan, terutama didorong oleh faktor pekerjaan dan pendidikan. Temuan survei ini menawarkan gambaran mendalam tentang dinamika distribusi populasi yang secara langsung memengaruhi perencanaan infrastruktur dan penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan, khususnya di Surabaya, yang menjadi fokus lokasi penelitian ini.

Publikasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023) yang memuat proyeksi penduduk hingga tahun 2045 mengindikasikan adanya tren demografi menuju masyarakat menua. Proyeksi ini menekankan perlunya penyesuaian kebijakan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan skema jaring pengaman sosial sebagai respons terhadap perubahan tersebut, yang tentu akan memiliki implikasi substansial terhadap perencanaan di tingkat kota, termasuk Surabaya.

Secara lebih spesifik pada ranah digitalisasi kependudukan, penelitian oleh (Kumara, D & Hayat, 2025) mengevaluasi dampak penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Studi ini sangat relevan karena

berlokasi sama dengan objek penelitian ini. Temuan mereka mengenai peran komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi dalam implementasi IKD akan menjadi landasan komparatif dan basis awal untuk analisis mendalam dalam penelitian ini.

Kemudian, penelitian oleh (djoko widodo 2024) yang fokus pada implementasi aplikasi IKD dalam mendukung pelayanan publik di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, memberikan perspektif mikro yang berharga. Studi tersebut mengidentifikasi berbagai tantangan dan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga melengkapi pemahaman yang lebih luas tentang adopsi IKD di tingkat kota. Sejalan dengan itu, (Isbandono, 2024) juga telah mengkaji efektivitas layanan pembuatan IKD di Disdukcapil Kota Surabaya. Penelitian mereka secara kuantitatif mengukur keberhasilan serta mengidentifikasi hambatan dalam proses layanan digital, aspek yang krusial dalam evaluasi implementasi IKD. Tidak kalah penting, kajian (Wati, 2024) yang menganalisis penerapan IKD dari perspektif *e-government* di Kecamatan Semampir, Surabaya, turut memperkaya wawasan mengenai tata kelola elektronik dalam layanan kependudukan.

Penelitian-penelitian sebelumnya berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi peneliti untuk memahami beragam perspektif dalam kajian yang serupa, serta menjadi landasan acuan dalam merumuskan penelitian yang sedang dilakukan. Melalui kajian ini, peneliti dapat memperluas pemahaman terhadap teori dan pendekatan yang relevan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, dalam bagian refleksi pustaka ini, peneliti menyajikan sejumlah temuan dari penelitian terdahulu sebagai referensi pendukung.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama, Judul & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Syevana Imania Putri Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2025	Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan loket penerbitan aplikasi IKD dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar memisahkan loket penerbitan IKD dengan loket cetak KTP-el, serta	Dalam penelitian sama-sama penelitian dalam IKD	Penelitian dalam tempat berbeda, penelitian dilakukan di Ducapil kabupaten bogor, sedangkan penulis penelitian berlokasi di kota surabaya tepatnya kecamatan wiyung.

		memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan instansi-instansi lainnya terkait penggunaan dan manfaat aplikasi IKD		
2	Lisna Rahmawati Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024	Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Pertama, pada subvariabel komunikasi yaitu. indikator transmisi tidak berfungsi dengan baik, kejelasan kurang baik, konsistensi kurang baik. Kedua, sumber daya yaitu staf bekerja dengan baik, ruangan	Dalam teknik peneliti sama-sama menggunakan data kualitatif	Tempat lokasi yang diteliti Ducapil kabupaten hulu sungai utara, sedangkan peneliti berlokasi dikota surabaya di kecamatan wiyung

		kurang tertata, aparat dikatakan bekerja dengan baik. Ketiga, pemeringkatan indikator sikap pelaksana dikatakan lancar, insentif kurang baik. Keempat, struktur struktural indikator standar operasional sistem (SOP) dapat dikatakan baik, fragmentasi cukup baik. Selain itu, berkurangnya animo masyarakat dan konektivitas internet menjadi faktor penghambat Program Identitas Kependudukan Digital (DPI).		
--	--	--	--	--

3	Nia Endri Wiranti Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. 2023	Teknologi digital sebenarnya hanyalah sebuah sistem pemrosesan yang sangat cepat yang mengubah semua jenis informasi menjadi nilai numerik. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, terdapat perubahan dalam kualitas dan efisiensi data yang dihasilkan dan dikomunikasikan, termasuk: Kualitas yang lebih baik, kapasitas yang lebih efisien, dan prosedur pengiriman yang lebih cepat. Data digital berfungsi sebagai pendukung penting untuk seluruh proses dalam kehidupan nyata.	Sama-sama melakukan penelitian teknologi pada pelayanan publik	Peneliti ini berfokuskan pada efisiensi pelayanan di era digital, sedangkan penulis berfokuskan pada implementasi IKD yang diraskan oleh pemahaman masyarakat.
---	--	--	---	---

4	Gusmeri Tun Huseno Peran kepercayaan dalam mediasi pengaruh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan layanan identitas kependudukan digital di kota payakumbuh 2024	Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Payakumbuh dengan menggunakan rumus Slovin. Analisis data yang digunakan adalah Partial Least Squares- Structural Equation Model (PLS-SEM) dengan uji instrumen data dilakukan dengan cara model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Hasil dari penelitian ini bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat penggunaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Payakumbuh. Persepsi	Peneliti sama-sama melakukan penelitian pada identitas kependudukan digital (IKD)	Peneliti ini berlokasi di kota payakumbuh, sedangkan penulis berlokasi di kota surabaya, tepatnya di kecamatan wiyung.
---	---	---	--	---

		kemudahan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Payakumbuh		
5	Adelika, Adelika Nurbaiti, Nurbaiti Upaya pencegahan terjadinya pencurian data pada e-ktp bagi penduduk pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan 2023	upaya pencegahan pencurian data pada E-KTP warga yang disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Pencurian data pribadi menjadi permasalahan serius di era digital ini, apalagi jika menyangkut data identitas kependudukan yang sensitif seperti E-KTP. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan peneliti lebih keamanan data, sedangkan penulis tentang prosedur dalam implementasi IKD beroperasi dan tahapan bagi masyarakat terkait adanya IKD

		pencurian data E-KTP dan mengidentifikasi upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan wawancara dengan petugas terkait untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pencurian data E-KTP dapat diidentifikasi melalui celah keamanan pada sistem penyimpanan dan pengolahan data.		
--	--	--	--	--

6	Vivtania Salsa Bella & Djoko Widodo Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari 2024	IKD merupakan digitalisasi dokumen kependudukan yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia pemilik KTP elektronik. Pada IKD ini, penduduk yang sudah melakukan aktivasi akan memperoleh informasi elektronik digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data pribadi penduduk. Tujuan adanya IKD yaitu untuk mengikuti penggunaan teknologi informasi serta komunikasi terkait digitalisasi, meningkatkan penggunaan digitalisasi, mempercepat	Persamaan dalam penelitian tentang IKD	Perbedaan peneliti ini lebih berfokuskan pada penunjang pelayanan publik, sedangkan penulis berfokuskan pada pemahaman yang dirasakannya adanya
---	--	--	---	--

		pertukaran pelayanan publik ataupun privat dalam bentuk digital dan memberikan keamanan kepemilikan IKD.		
7	Mohammad Geoveza Putra & Oktarizka Reviandani Penerapan e-government sistem informasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di kelurahan putat jaya 2024	Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan aplikasi berbasis website yang dirancang sebagai solusi terpadu satu klik untuk semua permasalahan perempuan, anak, dan keluarga. Ide inovasi e-Government ini datang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.	Sama-sama melakukan peneliti menggunakan metode kualitatif deskripsi	Peneliti ini berlokasi kelurahan di putat jaya, penulis beralokasi di kecamatan wiyung surabaya.

		Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data yang menggabungkan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIAP-PPAK di Kecamatan Putat Jaya telah terlaksana dengan baik dengan memenuhi enam (6) indikator model teoritis Van Meter dan Van Horn. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun kendala tersebut dapat diatasi sehingga layanan		
--	--	--	--	--

		perlindungan perempuan dan anak dengan menggunakan SIAP-PPAK dapat diberikan secara berkualitas.		
8	Nurdiana, I., & Ayumi, K Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dispendukcapil Kota Tanjungpinang. Harmoni Sosial 2024	Dalam hal komunikasi, Disdukcapil Kota Tanjungpinang memanfaatkan media sosial dan terjun langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan dan mengaktifkan aplikasi IKD. Tantangan muncul dari masyarakat yang masih awam dengan teknologi, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut dalam pendampingan penggunaan aplikasi tersebut. Sumber daya, seperti minimnya anggaran dan tim	Persamaan dalam penelitian aktivasi IKD, dan menggunakan metode kualitatif	Perbedaan peneliti berada di kota tanjung pinang, sedangkan penulis berlokasi dikota surabaya.

		khusus dapat menghambat implementasi yang efektif. Meskipun tim yang ada telah diberdayakan sebelumnya, perhatian lebih lanjut perlu diberikan pada keseimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Disposisi petugas Disdukcapil dalam membantu masyarakat mengaktifkan IKD adalah positif. Dalam struktur birokrasi, meskipun kekurangan personel, koordinasi dan pembagian kerja cukup baik		
--	--	--	--	--

9	Putri, B., & Reviandani, O. Penerapan e-government melalui pelaksanaan program ktp digital di kelurahan dr. Soetomo kota surabaya 2023	KTP Digital, yang juga dikenal sebagai identitas digital, merupakan sebuah kemajuan dari KTP Elektronik yang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan KTP Digital yang berbasis e-Government dan memahami proses aktivasi layanan KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, digunakan metode	Persamaan dalam peneliti sama-sama dalam IKD ,dan di kota surabaya.	Perbedaan titik tempat lokasi peneliti berada di kelurahan DR.Soetomo, sedangkan penulis di kecamatan wiyung, suarabya.
---	--	---	---	---

		pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Namun pelaksanaannya e-Government masih belum berjalan secara maksimal karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat desa mengenai kebijakan baru terkait aktivasi IKD sebelum cetak ulang KTP.		
10	Zafira, S. A., & Hertati, D Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital 2023	Pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan hasil dari pelaksanaan program Mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Persamaan dalam meneliti (IKD) identitas kependudukan digital, dan berada di surabaya.	Perbedaan peneliti berelokasi di rungkut kidul surabaya, dan penulis berlokasi di kecamatan wiyung, surabaya

		Kelurahan Rungkut Kidul. Program pendampingan tersebut sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan. Hasil dari program ini adalah setelah adanya pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tentunya sebagai salahh satu upaya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat mudah demi terciptanya good government serta berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya Identitas		
--	--	--	--	--

		Kependudukan Digital (IKD).		
--	--	-----------------------------	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup berbeda dengan penelitian yang lain diantaranya: Lokasi penelitian, fokus penelitian, pandangan penelitian, dan bentuk pelayanan.

2.6 Kerangka Fikir

Dalam penelitian dengan menggunakan kualitatif, kerangka pemikiran berfungsi sebagai fondasi konseptual yang membimbing pola pikir peneliti dan memperkuat subfokus yang menjadi inti studi. Keberadaan kerangka ini esensial untuk memberikan struktur dan arah yang jelas pada jalannya penelitian. Dengan demikian, kerangka pemikiran diperlukan untuk mengelaborasi konteks dan konsep penelitian secara lebih mendalam, yang pada gilirannya akan memperjelas lingkup studi, metodologi, serta aplikasi teoretis di dalamnya. Pembentukan kerangka pemikiran menjadi sangat krusial, terutama ketika penelitian memiliki keterkaitan erat dengan fokus utamanya. Berikut adalah kerangka pemikiran yang diterapkan dalam penelitian ini.

Gambar 2.2 Kerangka fikir

